

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peranan penting untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan. Melalui laporan keuangan tersebut perusahaan bisa mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan itu sendiri dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan, karena bagaimana pun kinerja keuangan yang baik, dapat mencegah *fraud* atau kesalahan pada perusahaan serta menjadi salah satu penentu kesuksesan perusahaan dalam meraih keuntungan. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka sangat disarankan untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetray reports*) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan berkualitas, apabila informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan juga dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dan dapat dipercaya. Informasi yang terdapat di dalam LKPD harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Kualitas laporan keuangan daerah juga dikatakan berkualitas, apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya bahwa laporan keuangan suatu entitas Pemerintah Daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Menurut Defitri (2016), kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dapat dipahami dan

memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern (Yuliani dan Agustini). Selain beberapa faktor tersebut, faktor peran auditor internal juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Peran auditor internal merupakan salah satu item yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dimana peran auditor internal mengevaluasi serta memberikan jaminan bahwa proses akuntansi yang dilakukan sudah sesuai standar akuntansi, juga membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan memberikan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan, sehingga peranan auditor internal yang maksimal dapat meminimalisir kesalahan dan ketidakwajaran dalam penyajian informasi keuangan yang nantinya akan dipublikasikan (Putra, dkk. 2017:160).

Peran auditor internal awalnya sebagai pengawas manajemen karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Seiring berjalannya waktu, fokus utama audit internal mengalami pergeseran menjadi

konsultan untuk perusahaan atau kliennya, yaitu membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan memberikan saran untuk tindakan perbaikan yang dapat memberikan tambahan nilai untuk memperkuat organisasi.

Penelitian mengenai peran auditor internal pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Windasari (2018), Erfiansyah dan Kurnia (2018), yang menunjukkan hasil bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun, berbeda dengan penelitian dari Arona, dkk (2017), yang menunjukkan bahwa, peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain peran auditor, pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson, dkk (1991) dalam Darmini dan Putra (2009) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian individu yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Teknologi informasi merupakan komponen penting bagi keberhasilan organisasi, tidak terkecuali organisasi di sektor pemerintahan. Untuk mewujudkan kinerja Pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Proses penerapan aplikasi ini membutuhkan suatu sistem informasi keuangan. Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna (Cindy and Ros, 2014).

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga, mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan , disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayaguna informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Teknologi informasi yang semakin berkembang dapat memudahkan seseorang dalam aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016), kapasitas yang memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal, jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi

informasi yang terus berkembang akan membantu pada proses pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Chodijah dan Hidayah (2018), dan Sikumbang, dkk (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2011) dan Pangestu (2019), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Provinsi NTT pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 tahun berturut-turut. Provinsi NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ada 286 entitas laporan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut. Sementara K/L dan Pemda yang memperoleh penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan tahun 2019 ada 570 entitas yang dapatkan WTP.

WTP merupakan tanda meningkatnya kualitas dari laporan keuangan Pemerintah. Untuk tahun 2019, terjadi peningkatan WTP dari Kementerian/Lembaga yakni sebanyak 84 entitas dari 81 pada tahun 2018. Sementara untuk LKPD tahun anggaran 2019, ada sejumlah 486 yang terima WTP dari 542 Pemerintah Daerah secara keseluruhan atau 89,7 persen. (*Sumber : Siaran*

Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT/Editor : Edy Latu/A.Arden-Bappelitbangda NTT).

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Peran Auditor Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT?
3. Apakah peran auditor internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

3. Untuk mengetahui pengaruh peran auditor internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan bagi penulis untuk semakin mengetahui peran auditor internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan atau opini guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.